



Kementerian PPN/Bappenas

# **PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)***



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/BAPPENAS**

**2017**

## KATA PENGANTAR

Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional dalam merumuskan SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi. Untuk menyusun Rencana Aksi TPB/SDGs tersebut telah disusun Pedoman sebagai panduan kepada seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun di daerah, sehingga dihasilkan Rencana Aksi TPB/SDGs yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Secara garis besar, pedoman penyusunan Rencana Aksi memuat keterkaitan antara TPB/SDGs dengan kebijakan pembangunan nasional dan mekanisme penyusunannya. Pedoman Rencana Aksi juga dilengkapi dengan matriks yang berisikan sasaran, program, kegiatan, sumber daya pendukung dan instansi pelaksana.

Buku **“Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)”** disusun melalui serangkaian proses diskusi dengan berbagai pihak yang meliputi perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Akademisi dan Pakar serta Pemerintah Daerah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat menjadi acuan penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan sekaligus memberikan sumbangan terhadap komitmen global.

Jakarta, Juli 2017



**Bambang P.S. Brodjonegoro**

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Ruang Lingkup .....	2
1.4 Landasan Hukum .....	3
<b>BAB II. KETERKAITAN TPB/SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN... 4</b>	
2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD .....	4
2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 terkait dengan TPB/SDGs .....	5
<b>BAB III. LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RENAKSI</b>	
<b>TPB/SDGs .....</b>	<b>12</b>
3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Renaksi TPB/SDGs.....	12
3.1.1 Tingkat Nasional.....	12
3.1.2 Tingkat Daerah.....	16
3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs .....	17
3.3 Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs .....	18
3.4 Jadwal Penyusunan Renaksi TPB/SDGs .....	19
<b>BAB IV. SISTEMATIKA RENAKSI TPB/SDGs .....</b>	<b>21</b>
4.1 Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs .....	21

4.2 Matrik Renaksi TPB/SDGs dan Penjelasannya .....	26
<b>BAB V. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs .....</b>	<b>31</b>
5.1 Pengorganisasian.....	31
5.2 Uraian Tugas.....	36
5.3 Mekanisme Kerja.....	37
5.4 Pengorganisasian, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja di Daerah .....	37
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>40</b>
Lampiran 1. Peraturan Preiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	40
Lampiran 2. Contoh Matriks Renaksi TPB/SDGs .....	41
Lampiran 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs .....	86

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jadwal penyusunan Renaksi TPB/SDGs .....	19
Tabel 2. Format Matriks Renaksi TPB/SDGs.....	27
Tabel 3. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs .....	34

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan .....	5
Gambar 2. Bagan struktur organisasi penyusunan Renaksi TPB/SDGs.....	34

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

## **1.2 Tujuan**

Pedoman teknis penyusunan Renaksi TPB/SDGs bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah dalam menyusun Dokumen Renaksi TPB/SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi pendahuluan, keterkaitan TPB/SDGs dengan kebijakan pembangunan, langkah teknis, jadwal penyusunan, sistematika dan pengorganisasian penyusunan Renaksi TPB/SDGs.



#### **1.4 Landasan Hukum**

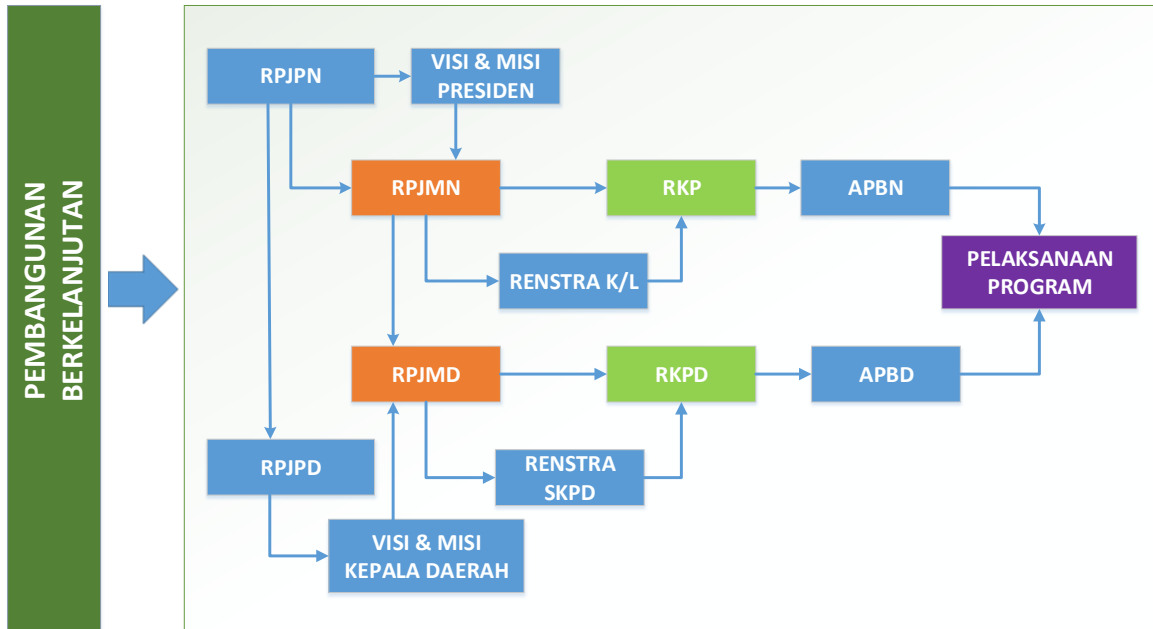
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

## **BAB II. KETERKAITAN TPB/SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

### **2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD**

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). RPJMN tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.



Gambar 1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan

## 2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 terkait dengan TPB/SDGs

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai dengan TPB/SDGs:

### Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (ii) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan (iii) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

### Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

### **Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (vii) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

### **Tujuan 5. Kesenjangan Gender**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

### **Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan (viii) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

### **Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

### **Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial; (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif; (ix)

Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; dan (ix) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

#### **Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur; (iii) Implementasi prinsip *Value for Money* (VfM); (iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (viii) Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (viii) Pembangunan taman tekno dan taman sains; (ix) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (x) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (xi) Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (xii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiii) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

#### **Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

#### **Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

## **Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

## **Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan.

## **Tujuan 14. Ekosistem Lautan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

## **Tujuan 15. Ekosistem Daratan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

### **Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (ii) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (iii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iv) Penerapan *e-government* untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; (v) Penerapan *open government*; (vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (ix) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (x) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; (xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; (xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; serta (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal.

### **Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular; (iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (v) Mendorong pembangunan *fixed/wireline broadband*; (vi) Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama



Pemerintah Swasta (KPS); (vii) Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; (viii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; serta (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.

Uraian kebijakan TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.

## **BAB III. LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs**

Sesuai dengan mandat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka akan disusun dokumen Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/SDGs tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Renaksi TPB/SDGs**

#### **3.1.1 Tingkat Nasional**

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

##### **1. RPJMN Tahun 2015-2019**

Dokumen RPJMN 2015-2019 merupakan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan terkait dengan pencapaian target TPB/SDGs. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pencapaian TPB/SDGs.

##### **2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019**

Dokumen Renstra K/L tahun 2015-2019 yang terkait langsung dengan TPB/SDGs diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan yang

dilakukan dengan pencapaian target TPB/SDGs. Program, kegiatan dan tindakan yang ada dalam Renstra bersifat lebih teknis dan rinci bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2015-2019. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pembangunan dalam RPJMN tahun 2015-2019.

### **3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan**

Dokumen RKP tahunan diperlukan dalam penetapan indikator, target, dan anggaran. Perbaikan target dan anggaran tahunan dalam RPJMN 2015-2019 diakomodasi dalam RKP tahunan termasuk di dalamnya perbaikan indikator, target, dan anggaran terkait pencapaian target TPB/SDGs.

### **4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Dokumen Perpres No. 59 Tahun 2017 merupakan dasar hukum dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

### **5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia**

Laporan 15 tahun Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia 2015 merupakan laporan lengkap yang berisikan capaian indikator MDGs dari setiap tujuan dan target selama periode tahun 2000 sampai tahun 2015. Pada laporan tersebut dijelaskan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia serta program-program yang telah dilaksanakan. Dilaporkan pula tentang pembelajaran dari praktek-praktek baik untuk memperkuat agenda TPB/SDGs. Pada bagian akhir dari laporan ini, diidentifikasi berbagai indikator yang perlu dilanjutkan antara lain penurunan kemiskinan, penurunan angka kematian Ibu, penurunan prevalensi penyakit HIV dan AIDS, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi layak terutama pada daerah perdesaan.

### **6. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait**

a. **Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*** adalah dokumen yang disepakati secara global

pada tanggal 25 September 2015 sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030. Dokumen ini merupakan pedoman penting atas berbagai masalah global terutama terkait dengan 3 (tiga) dimensi penting pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan Hidup. Dokumen ini memuat 17 tujuan (*goals*) dan 169 target, kesemua tujuan dan target tersebut menjelaskan bahwa SDGs merupakan aksi dunia untuk menciptakan dunia bebas dari kemiskinan; kelaparan dan penyakit; dunia yang menghormati HAM; keadilan dan kesetaraan serta dunia yang tiap negara dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**b. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)**

**2014-2020.** RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang: pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; pengelolaan limbah; dan kegiatan pendukung lain. RAN-GRK merupakan pedoman bagi Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK. RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

**c. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) 2014-2024.**

RAN-API merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional Indonesia. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (*climate proof/ resilient development*) di tingkat nasional. Tujuan khusus penyusunan RAN-API adalah untuk: (i) Memberikan arahan untuk pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan nasional; (ii) Menyediakan arahan bagi aksi adaptasi perubahan iklim sektor, serta aksi adaptasi perubahan iklim terintegrasi (lintas sektor) di dalam perencanaan

jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (2015- 2019), dan jangka panjang (2020-2025); (iii) Menyediakan arahan bagi langkah aksi adaptasi prioritas jangka pendek untuk diusulkan, agar mendapatkan perhatian khusus dan dukungan pendanaan internasional; (iv) Sebagai arahan bagi sektor dan daerah dalam mengembangkan langkah aksi adaptasi yang sinergis dan upaya membangun sistem komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif. RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada RKP maupun RPJMN di masa depan, agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L).

- d. Dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (JAKSTRA PB).** Dokumen JAKSTRA merupakan dokumen acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia menjadi lebih terarah, terkoordinasi dan terpadu, yang disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Naskah Akademik Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), dan SENDAI Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
- e. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019.** RAN-HAM Merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia tahun 2015-2019 dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia.
- f. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025.** Dokumen ini memuat visi, misi, sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan piranti anti-korupsi. Stranas PPK mempunyai 6 (enam) strategi yaitu (1) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) Melaksanakan

- langkah-langkah strategis di bidang penindakan; (3) Melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundangan undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor lain yang terkait; (4) Melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi; (5) Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi; dan (6) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.
- g. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019.** RAN-PG merupakan rencana aksi nasional dengan pendekatan multisektor untuk meningkatkan keadaan pangan dan gizi masyarakat Indonesia. Dokumen ini memuat fokus perbaikan pangan dan gizi masyarakat serta intervensi yang akan dilakukan baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Dokumen tersebut berisi kerangka logis tentang dampak yang akan dicapai, output, program dan kegiatan serta instansi penanggung jawab.
- h. *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020.*** Dokumen IBSAP merupakan acuan nasional tentang pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (kehati) Indonesia. Dokumen ini disusun berdasarkan kerangka global *Aichi Targets*, Dokumen RPJMN 2015-2019, dan Dokumen Renstra K/L terkait. Dokumen IBSAP memuat pemutakhiran data kehati Indonesia, kebijakan dan strategi pengelolaan kehati, target nasional, dan rencana aksi pengelolaan kehati serta rencana pengelolaan kehati paska tahun 2020.

### **3.1.2 Tingkat Daerah**

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

1. RPJMN 2015-2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD;
4. Peraturan Gubernur tentang TPB/SDGs Provinsi masing-masing daerah;

5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia;
6. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;
7. Dokumen yang terkait dengan tugas fungsi pemerintah daerah;
8. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait: (a) Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, (b) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2014-2020, (c) Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) 2014-2024, (d) JAKSTRA PB, (e) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) 2015-2019, (f) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025, (g) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019, dan (h) IBSAP 2015-2020.

### **3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs**

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1:** Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan atas Keputusan Menteri PPN terkait Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk tingkat nasional dan Pergub untuk tingkat daerah;
- Langkah 2:** Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- Langkah 3:** Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB/SDGs, dengan tahapan:
1. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs
  2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB/SDGs
  3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana

4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs

**Langkah 4:** Melaksanakan pembahasan Draf Renaksi TPB/SDGs (narasi dan matrik) masing-masing Pokja;

**Langkah 5:** Melaksanakan Pleno penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing-masing Pokja;

**Langkah 6:** Melakukan Penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;

**Langkah 7:** Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Menteri PPN/Ka. Bappenas) dan oleh gubernur di tingkat daerah.

**Langkah 8:** Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

**Langkah 9:** Melakukan penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional.

### **3.3 Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs**

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



### 3.4 Jadual Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Tabel 1. Jadual penyusunan Renaksi TPB/SDGs

No	Kegiatan	Bulan Pada Tahun 2017												Tahun 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pengesahan Perpres Pelaksanaan Pencapaian													
2	Pembentukan Tim Penyusun Renaksi TPB/SDGs													
3	Sidang Pleno pertama persiapan penyusunan Draf Renaksi melibatkan seluruh stakeholder.													
4	Penyusunan Definisi Operasional Indikator TPB/SDGs (1) internal Sekretariat, (2) BPS, (3) KL terkait]													
5	Penyusunan Draf I Renaksi TPB/SDGs oleh masing- masing Pokja													
	a. Analisis situasi dan tantangan													
	b. Perumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator													
	c. Alokasi pagu indikatif dan indentifikasi pelaksana													
	d. Monev dan Pelaporan													
6	Sidang Pleno Draf 1													

No	Kegiatan	Bulan Pada Tahun 2017												Tahun 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Penyusunan Draf II Renaksi TPB/SDGs oleh masing- masing Pokja													
8	Pleno penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs													
9	Penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs													
10	Pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Men. PPN/Ka.Bappenas)													
11	Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs													
12	Penyusunan Renaksi TPB/SDGs di Daerah													

## **BAB IV. SISTEMATIKA RENAKSI TPB/SDGs**

### **4.1 Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs**

Dokumen Renaksi TPB/SDGs akan berisi:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD
- 1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs
- 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.5. Pembiayaan TPB/SDGs
- 1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs
- 1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

#### **BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs**

- 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
- 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

- 2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
- 2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- 2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- 2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan
- 2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
- 2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
- 2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
- 2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

### **BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs**

- 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- 3.5. Tujuan 5 Kesenjangan Gender
- 3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- 3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- 3.11. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- 3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

- 3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- 3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- 3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

## **BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2017-2019
- 4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

## **BAB V PENUTUP**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

- 1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah
- 2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

### Penjelasan penulisan:

#### **1. BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD**

Pada bagian ini diuraikan keselarasan dan sinergi dari TPB/SDGs terhadap Nawacita, RPJMN, dan RPJMD.

##### **1.2. SDGs Menyempurnakan MDGs**

Pada bagian ini menjelaskan secara umum tentang MDGs dan capaiannya, serta menunjukkan bahwa TPB/SDGs menyempurnakan MDGs secara lebih luas, terintegrasi, komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

### **1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs**

Pada bagian ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

### **1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs**

Pada bagian ini menjelaskan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs yaitu universal, terintegrasi antar dimensi, inklusif dan *no one left behind*, serta mencakup sarana pelaksanaan.

### **1.5. Pembiayaan TPB/SDGs**

Pada bagian ini menjelaskan pembiayaan TPB/SDGs yang berasal dari pemerintah, sumber pembiayaan dari masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs**

Pada bagian ini menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proses penyusunan rencana aksi yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

### **1.7. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs**

Pada bagian ini menjelaskan sistematika penyusunan dokumen rencana aksi TPB/SDGs.

## **2. BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs**

Pada bagian ini diuraikan tentang status capaian, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dituliskan secara terkonsolidasi.

## **3. BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs**

Pada bagian ini dijelaskan target dan arah kebijakan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Dituliskan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing Tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan. Target setiap indikator ditampilkan sebagaimana dicontohkan dalam

matriks (tabel 2 format matriks bagian 1). Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan/atau RPJMD yang berlaku.

#### **4. BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu menggambarkan:

##### **1) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi**

Berisi uraian tentang cara dan tahapan pemantauan dan evaluasi tujuan, target dan indikator TPB/SDGs dan mekanisme umpan balik yang dilakukan oleh setiap tim pelaksana dan pokja masing-masing pilar.

##### **2) Mekanisme Pelaporan**

Berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practices*, *human stories*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Disamping itu, laporan ini juga akan berisikan uraian tentang program, kegiatan, anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain, meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar, serta dipublikasikan agar bisa diakses oleh publik.

##### **3) Waktu pelaksanaan.**

Berisikan tentang jadwal waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan.

#### **5. BAB V. PENUTUP**

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Universal*: Dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang
2. *Integration*: Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait)
3. *No-One Left Behind*: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan.

Prinsip-prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: Membangun kepercayaan (*trust building*); Kemitraan yang setara; Partisipasi; Akuntabel; dan Saling menguntungkan.

Pada bagian ini juga diuraikan tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs serta upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan.

## **6. LAMPIRAN**

Pada bagian ini terdiri atas dua lampiran yaitu:

### **1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah**

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah.

### **2. Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah**

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan) yang dilaksanakan oleh organisasi non pemerintah.

## **4.2 Matrik Renaksi TPB/SDGs dan Penjelasannya**

Renaksi TPB/SDGs dituliskan dalam bentuk matrik berikut:



Tabel 2. Format Matriks Renaksi TPB/SDGs

**NAMA TUJUAN**

Kode Indikator (1)	Indikator (3)	Sumber Data (4)	Satuan (5)	Tahun Dasar (6)	Target Pencapaian (7)			
					2016	2017	2018	2019
Target (2)								

**BAG 1**

TARGET DAN INDIKATOR TPB/SDGs

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (3)	Target Tahunan (4)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta (5)	Sumber Pendanaan (6)	Instansi Pelaksana (7)	
			2016	2017	2018	2019				
PROGRAM PEMERINTAH										
INDIKATOR TPB/SDGs 1:										
PROGRAM 1:										
Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan									
	1.2. Output Kegiatan									
Kegiatan 2	2.1. Output Kegiatan									
	2.2. Output Kegiatan									

**BAG 2**

PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (3)	Target Tahunan (4)				Indikatif Alokasi Anggaran (5)	Sumber Pendanaan (6)	Lokasi (7)	Lembaga Pelaksana (8)
			2016	2017	2018	2019				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
INDIKATOR TPB/SDGs 1:										
PROGRAM 1 :										
Kegiatan 1:	1.1. Output Kegiatan:									
	1.2 Output Kegiatan									
Kegiatan 2:	2.1 Output Kegiatan									
	2.2 Output Kegiatan									

**BAG 3**

PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH NON PEMERINTAH

## **Petunjuk Umum Pengisian Matrik Renaksi TPB/SDGs**

1. Matrik ini berlaku untuk setiap tujuan dalam TPB/SDGs sepanjang target bersifat kuantitatif. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan, atau dapat ditulis secara naratif secara tahunan dengan menetapkan tahun dasar (*baseline*) serta instansi/lembaga pelaksana.
2. Program dan kegiatan berasal dari nasional/daerah (K/L/OPD terkait) sesuai tanggung jawab masing-masing, sebagai acuan penyusunan Renaksi TPB/SDGs. Kegiatan tersebut bersifat operasional dan memiliki target indikator kegiatan yang terukur tiap tahun. Kegiatan dapat dimutakhirkan sesuai kebijakan program pada dokumen resmi terbaru sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional/daerah maupun target TPB/SDGs.
3. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.
4. Cara pengisian matrik
  - a. Tabel Bagian 1 (merupakan bagian dari BAB III):
    - Kode Indikator (1): Berisi nomor indikator TPB/SDGs
    - Target (2): Nama target TPB/SDGs global
    - Indikator (3): Nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator
    - Sumber Data (4): Berisi sumber data untuk tahun dasar dan target indikator
    - Satuan (5): Berisi satuan dari indikator
    - Tahun Dasar (6): Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
    - Target (7): Berisi target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir

b. Tabel Bagian 2:

- **Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1):** Diisi dengan nama program, kegiatan, output kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi;
- **Satuan (2):** Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- **Tahun Dasar (3):** Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- **Target Tahunan (4):** Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- **Indikatif Alokasi Anggaran (5):** Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama 5 tahun untuk setiap kegiatan;
- **Sumber Pendanaan (6):** Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun (APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- **Instansi Pelaksana (7):** Berisi nama K/L atau SKPD/OPD yang melaksanakan program tersebut.

c. Tabel Bagian 3:

- **Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1):** Diisi dengan nama program, kegiatan, output kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs;
- **Satuan (2):** Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- **Tahun Dasar (3):** Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- **Target Tahunan (4):** Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
- **Indikatif Alokasi Anggaran (5):** Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst) untuk setiap kegiatan;

- **Sumber Pendanaan (6):** Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst);
- **Lokasi (7):** Berisi lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa);
- **Instansi Pelaksana (8):** Berisi nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

## **BAB V. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs**

### **5.1 Pengorganisasian**

Organisasi yang menyusun Renaksi TPB/SDGs terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja untuk masing-masing pilar dengan susunan organisasi sebagai berikut:

#### **1. Tim Pengarah**

Tim Pengarah terdiri atas:

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Anggota : Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Staf Presiden.

#### **2. Tim Pelaksana**

Tim Pelaksana terdiri atas:

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
- Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon I Kementerian/Lembaga terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

#### **3. Kelompok Kerja**

Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas:

##### **a. Pokja I Pilar Pembangunan Sosial**

- Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Sekretaris : Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

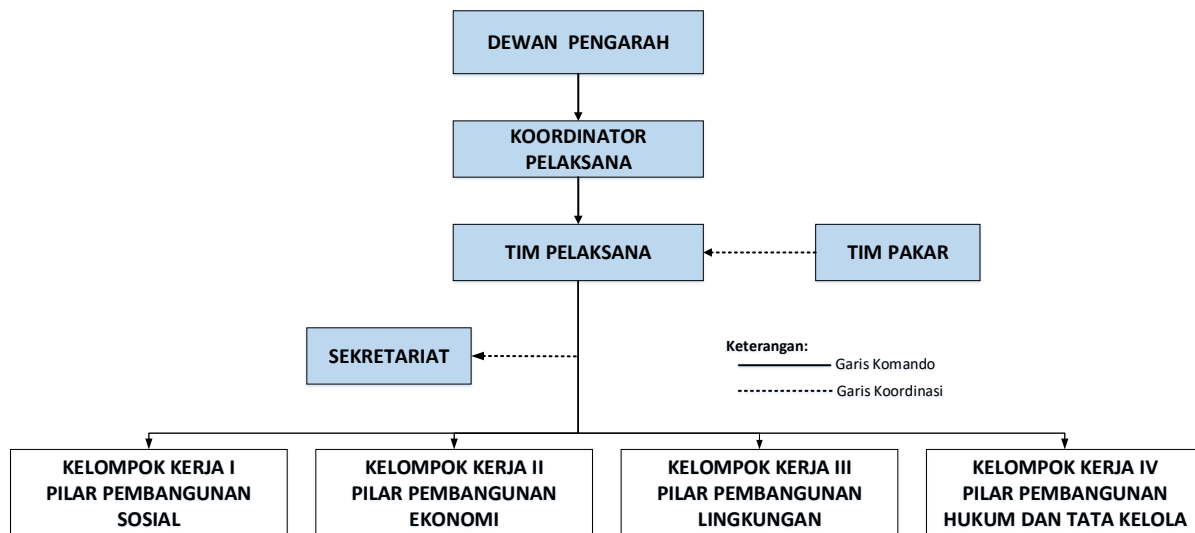
b. Pokja II Pilar Pembangunan Ekonomi

- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua IV : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Perekonomian
- Sekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

c. Pokja III Pilar Pembangunan Lingkungan

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas

- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
  - Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman
  - Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
  - Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
- d. Pokja IV Pilar Hukum dan Tata Kelola
- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
  - Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
  - Wakil Ketua II : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - Sekretaris : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas
  - Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku, wakil akademisi dan pakar



Gambar 2. Bagan struktur organisasi penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Pada tabel berikut disajikan secara rinci pembagian organisasi kelompok berdasarkan dengan Pilar TPB/SDGs.

Tabel 3. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja	
<b>POKJA I</b> Pilar Pembangunan Sosial	Tujuan 1	Ketua	: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 2		
	Tujuan 3		
	Tujuan 4	Wakil Ketua I	: Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 5		
		Wakil Ketua II	: Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		Sekretaris	: Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota	: Eselon 2 terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar



<b>Nama Pokja</b>	<b>Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs</b>	<b>Organisasi Pokja</b>
<b>POKJA II</b> Pilar Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7	Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 8	
	Tujuan 9	Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 10	
	Tujuan 17	Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua IV : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Perekonomian
<b>POKJA III</b> Pilar Pembangunan Lingkungan		Sekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
	Tujuan 6	Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 11	
	Tujuan 12	Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 13	
	Tujuan 14	Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman
<b>POKJA IV</b> Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 15	Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota : : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS da media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
	Tujuan 16	Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja
	Wakil Ketua II :	Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Sekretaris :	Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas
	Anggota :	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

## 5.2 Uraian Tugas

### 1. Tim Pengarah:

- Memberikan arahan dalam pencapaian TPB/SDGs di Indonesia
- Menyampaikan laporan pencapaian TPB/SDGs kepada Presiden

### 2. Tim Pelaksana:

- Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman Renaksi TPB/SDGs
- Memberikan arahan dan masukan kepada POKJA mengenai substansi penyusunan Renaksi TPB/SDGs
- Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs
- Menyampaikan laporan penyusunan Renaksi TPB/SDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas

### 3. Kelompok Kerja:

- Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;

- c. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- d. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
- e. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;
- g. Melakukan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

### **5.3 Mekanisme Kerja**

- a. Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- b. Sidang Pleno Tim Penyusunan Renaksi TPB/SDGs untuk Persiapan Penyusunan Draf Renaksi TPB/SDGs;
- c. Penyusunan Draf I Renaksi TPB/SDGs;
- d. Penyusunan Draf II Renaksi TPB/SDGs;
- e. Penyusunan Draf Final Renaksi TPB/SDGs;
- f. Pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- g. Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs.

### **5.4 Pengorganisasian, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja di Daerah**

Pengorganisasian, uraian tugas, dan mekanisme kerja penyusunan Renaksi TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu pada pola di tingkat nasional sebagaimana telah dijelaskan diatas.

## **BAB VI. PENUTUP**

Pedoman penyusunan Renaksi TPB/SDGs merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun Renaksi TPB/SDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Seluruh langkah teknis penyusunan, jadwal, sistematika dokumen Renaksi, serta pengorganisasian Renaksi untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi daerah mengacu pada pola di tingkat nasional. Dengan pedoman ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah dapat menyusun Renaksi TPB/SDGs dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya.

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
Inpres	: Instruksi Presiden
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
K/L	: Kementerian/Lembaga
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Perpres	: Peraturan Presiden
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PONED	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PUG	: Pengarusutamaan Gender
Renaksi TPB	: Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RENSTRA RKPD	: Rencana Strategis RKPD
RKA-SKPD	: Rencana Kerja Anggaran
SKPD RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UU	: Undang Undang

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*;
- b. bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang- ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN  
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

3. Rencana ...





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional.
4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Filantropi ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

### Pasal 3

Sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):

- a. digunakan sebagai pedoman bagi:
  1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB; dan
- b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

### Pasal 4

Dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB.

### Pasal 5

Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

#### Pasal 6

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.

#### Pasal 7

Dalam rangka pencapaian TPB, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan:

- a. fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; dan
- c. sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 8

Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB, dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.

#### Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua : Presiden;

Wakil Ketua : Wakil Presiden;

Wakil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian;
- Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan;
- Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang  
Kemaritiman;
- Wakil Ketua IV : Menteri Koordinator Bidang  
Politik, Hukum, dan  
Keamanan.
- Koordinator Pelaksana : Menteri Perencanaan Pem-  
merangkap Anggota bangunan Nasional/Kepala  
Badan Perencanaan Pemba-  
ngunan Nasional.
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Keuangan;  
4. Menteri Badan Usaha Milik  
Negara;  
5. Sekretaris Kabinet;  
6. Kepala Staf Kepresidenan.

#### Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB.

(2) Tim ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin secara bersama yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.

#### Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB.
- (2) Tim Pakar memberikan pertimbangan substansi TPB kepada Tim Pelaksana untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Nasional dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana.

#### Pasal 15

- (1) Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 16

- (1) Sasaran dan Indikator TPB Nasional dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Dewan Pengarah atas masukan dari Tim Pelaksana dan/atau pertimbangan Tim Pakar.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

#### Pasal 17

- (1) Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### Pasal 18

Hasil pelaksanaan TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menjadi bahan pelaporan pencapaian TPB Indonesia pada tingkat regional dan global setiap tahunnya.

#### Pasal 19

Pendanaan TPB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal ...





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. paling lama 12 (dua belas) bulan, Peta Jalan TPB tahun 2017-2030;
- b. paling lama 6 (enam) bulan, RAN TPB tahun 2017-2019; dan
- c. paling lama 12 (dua belas) bulan, RAD TPB tahun 2017-2019,

telah ditetapkan.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan TPB ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 22

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,



*Agustina Murbaningsih*  
Agustina Murbaningsih

## Lampiran 2. Contoh Matriks Renaksi TPB/SDGs

### TUJUAN 1. Tanpa kemiskinan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS	% (kondisi maret)	11,22	10,86a	10,64a	7,5-8,5	7,0-8,0
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPS, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial	%	61,5	66,5a	71,8a	85	95
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, ASABRI; Sakernas BPS	Formal (%)	6	22,59a	24,73a	27,15	100
			Informal (%)	1	1,17a	1,41a	1,98	10
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	PBDT PMKS Kementerian Sosial	%	0,83	0,84a	0,49	0,50	0,57
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	PBDT PMKS Kementerian Sosial	Jiwa	3,51 Juta	3,51a Juta	6 Juta	10 Juta	10 Juta

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
INDIKATOR SDGs:										
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
PROGRAM 1: KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN										
Kegiatan 1: Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Dokumen	3	5	3	3	3	10.660	APBN	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
PROGRAM 2: PENANGANAN FAKIR MISKIN										
Kegiatan 1: Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	1.1 Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Perdesaan (Penyediaan Sarana Prasarana Lingkungan di Perdesaan)	Unit	170	30	20	30	30	-	APBN	Kementerian Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN										
INDIKATOR SDGs:										
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
PROGRAM 1: Zakat Pemberdayaan Masyarakat										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Bantuan Modal Usaha	1.1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan modal bantuan usaha	Jiwa	-	-	277000	277000	277000	10.040.625	Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah Baznas dan Laznas) (I= Tersedia)	Nasional = 34 Provinsi	Baznas Pusat; Baznas Provinsi dan Kab/Kota
<b>PROGRAM 2: Layanan Langsung Mustahik (Penerima)</b>											
Kegiatan 1: Bantuan Langsung Tunai	1.1 Jumlah mustahik yang dilayani secara nasional	Jiwa	-	-	8000000	8000000	8000000	2.230.000	Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah Baznas dan Laznas) (I= Tersedia)	Nasional = 34 Provinsi	Baznas Pusat; Baznas Provinsi dan Kab/Kota

## TUJUAN 2. Tanpa kelaparan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	Susenas BPS; Riskesdas Kementerian Kesehatan; BKP; FAO/WHO/UNU	%	16,46 (2011)	PM	7,8a	PM	PM
2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	%	19,6 (2013)	21,0a	PM	PM	17,0

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Susenas BPS	%	9,76 (2017)	PM	9,76a	PM	PM
<b>Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>								
2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta.	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	%	32,9 (2013)	26,1a	29,6	28,8	28,0

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN										
INDIKATOR SDGs:										
2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)										
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.										
2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.										
PROGRAM 1: Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan										
Kegiatan 1: Peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai.	1.1 Produksi padi	juta t	75,36	76,20	81,2	82,5	84,1	39.703.830	APBN, APBD, SWADAYA (anggaran total program)	Kementerian Pertanian
	1.2. Produksi Jagung	juta t	19,61	21,35	26	30	33			Kementerian Pertanian
	1.3. Produksi kedelai	juta t	0,96	1,50	0,68	2,2	2,8			Kementerian Pertanian
PROGRAM 2: Peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura										
Kegiatan 1: Peningkatan produksi cabai dan bawang merah.	1.1 Produksi cabai besar	ribu t	1082	1209	1246	1283	1322	6.626.090	APBN, APBD (anggaran total program)	Kementerian Pertanian
	1.2 Produksi cabai rawit	ribu t	751	890	917	944	973			Kementerian Pertanian

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Produksi bawang merah	ribu t	1125	1291	1329	1369	1411			Kementerian Pertanian
<b>PROGRAM 3: Peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan.</b>										
Kegiatan 1: Peningkatan produksi gula tebu.	1.1 Produksi gula kristal putih	juta t	2,62	2,80	2,95	3,30	3,80	39.703.830*	APBN, APBD (anggaran total program)	Kementerian Pertanian

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN											
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.											
PROGRAM 1: Panti dan Santunan Keluarga Aisiyyah											
Kegiatan 1: Santunan Keluarga Aisiyyah	1.1 296 Panti dan 1000 Lebih Santunan Keluarga	Anak	57760	50000	50000	50000	50000	-	SWADAYA, DINSOS (I= Tersedia)	30 PROVINSI	AISYIYAH
Kegiatan 2: Bantuan Vitamin dan Family Support	2.1 1000 lebih family support tiap cabang dan ranting	Anak	30000	30000	30000	30000	30000	-	SWADAYA, DINSOS (I= Tersedia)	seluruh indonesia	AISYIYAH
PROGRAM 2: Ketahanan Keluarga											
Kegiatan 1: Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang	1.1 Sosialisasi Pola asuh anak 1000 HPK	Orang	300 (2017)	-	300	-	-	PM	BKKBN	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 2: GEMARIKAN 1.1 Sosialisasi GEMARIKAN	Orang	200	-	-	-	-	PM	KKP	Nasional	Dharma Wanita Persatuan Pusat

### TUJUAN 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	SP/SUPAS	kematian per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010) /305 (SUPAS 2015)	-	-	-	306
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Susenas BPS	%	91,51	92,6a	PM	PM	PM
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS	%	77,63	79,7a	79	82	85
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	kematian per 1000 kelahiran hidup	40 (2012)	-	-	PM	-
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	kematian per 1000 kelahiran hidup	19 (2012)	-	-	PM	-
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	kematian per 1000 kelahiran hidup	32 (2012)	-	-	PM	24



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Kemenkes	%	66 (2015)	80,7a	85	90	95
<b>Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</b>								
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Kemenkes	%	0,33	0,33a	<0,5	<0,5	<0,5
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kemenkes	%	395	391	379	364	344

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA											
INDIKATOR SDGs:		3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup 3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi									
PROGRAM 1: PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (Matriks KL/II.M.L.024-13)											
Kegiatan Pembinaan Masyarakat	1: Gizi	1.1 Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	%	32,7	79,3	65	80	95	3.800.300	APBN**	Kementerian Kesehatan
		1.2 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	30,2 (2013)	54	44	47	50			
		1.3 Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan	%	75,4	80,4	90	95	98			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 2: PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN (Matriks KL/IL.M.L.024-16)										
Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 1:	1.1 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Kecamatan	93 (2015)	1306	1400	2800	5600	15.857.100	APBN**	Kementerian Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA											
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).											
PROGRAM 1: Kesehatan Ibu dan Anak											
Kegiatan Health Campaign 1:	1.1 . Jumlah kunjungan ANC ke Posyandu/Faskes	prosentase	-	80	85	90	95	300	Mitra - PELKESI-Gereja (I= Tersedia)	5 kabupaten (DeliSerdang, Katingan, Sumba Barat, Purworejo, Tanah Toraja), Kab Mimika	Seknas & Pelkesi Wilayah
	1.2. Prosentase alokasi biaya kesehatan tingkat desa	prosentase	-	5	10	10	10		Mitra - PELKESI-Gereja (I= Tersedia)	5 kabupaten (DeliSerdang, Katingan, Sumba Barat, Purworejo, Tanah Toraja)	Seknas & Pelkesi Wilayah
PROGRAM 2: Child Survival Advocacy											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Non health government/non-government institutions are mobilized to support MoH in securing necessary resources for improved child health program at national level by 2020	1.1 champions identified and mobilized - cross program group established and actively engaged and influencing Child Health discussion - # of policies on child health that influenced by Coalition	-	-	-	-	-	-	-	Gates Foundation (III- Belum tersedia sumber)	Nasional	Yayasan Sayangi Tunas Cilik

#### TUJUAN 4. Pendidikan berkualitas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	BAN, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, EMIS Kemenag	%	63,9	69,59a	79	81,6	84,2
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	BAN, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, EMIS Kemenag	%	61,45	63,05a	74,8	77,9	81
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	BAN, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, EMIS Kemenag	%	63,87	67,15a	80,9	82,8	84,6

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Susenas BPS	%	110,5	109,31a	111,43	113,41	114,09
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Susenas BPS	%	91,17	90,12a	105,29	106,7	106,94
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Susenas BPS	%	78,02	80,89a	88,14	89,74	91,63
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Susenas BPS	Tahun	8,25	8,36a	8,6	8,7	8,8
<b>Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</b>								
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Susenas BPS	%	48,52	47,45a	72,97	75,07	77,23

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS										
INDIKATOR SDGs:		4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika								
PROGRAM 1: PROGRAM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Matriks KL/IL.M.L.023-23)							5.194.328	APBN		
Kegiatan 1: Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.1 Jumlah guru yang meningkat kompetensi bidangnya (Matematika dan Bahasa)	Orang	-	151359	154702	158112	161589	-	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Ditjen GTK, UPT PPPTK Bahasa dan PPPPTK Matematika

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 2: Ujicoba soal matematika di Asia Tenggara untuk kelas 4, 6 dan 9	2.1 Jumlah siswa yang meningkat kemampuan matematikanya di 11 Negara Anggota SEAMEO	orang	-	990	990	1650	1650	-	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SEAMEO QITEP in Mathematic (SEAQIM)
<b>PROGRAM 2: PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA (Matriks KL/IL.M.L.023-37)</b>										
Kegiatan 1: Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia	1.1 Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	Acuan	-	3	3	3	3	241.859	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan, 30 Balai/Kantor Bahasa
	1.2 Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra	Terbitan	-	10	28	28	28			
	1.3 Jumlah Kosakata Indonesia	Kosakata	-	28967	43000	2000	2000			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS										
INDIKATOR SDGs:	4.1.1(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 4.1.1(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 4.1.1(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B									
PROGRAM 1 : National/ district education support for children's learning improvement										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
Kegiatan 1: Pembentukan koalisi pendidikan daerah dalam mendukung peningkatan pembelajaran	1.1.1 Indikator Kegiatan : # mitra, koalisi, champion atau pemberi pengaruh utama yang bekerja dengan Kelompok Kerja CVA-(Citizen Voice and Action) untuk secara kolektif mempengaruhi tingkat lokal dan tingkat tinggi pemerintahan terhadap pendidikan	Mitra	-	-	-	-	-	2.500	Multi funding dari dalam dan luar negeri (I= Tersedia)	Kalimantan Barat (Kab. Landak, Kab. Sambas), NTT (Sikka, Ngada, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo), Sumatera Utara (Nias), Papua (Sentani, Jayawijaya), Papua Barat (Biak Numfor)	Wahana Visi Indonesia

## TUJUAN 5. Kesenjangan gender

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	KPPPA; Kemhukham; Kemdagri; Komnas Perempuan; Kementerian PPN/Bappenas	Dokumen	19	22	22	18	16
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SPHPN BPS	%	10,4 (2016)	10,4a	Menurun	Menurun	Menurun

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	SKtA BPS	%	20,48 (2013)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SPHPN BPS	%	4,66 (2016)	4,66a	Menurun	Menurun	Menurun
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Menggunakan Data Lampiran Perpres (RPJMN 2015-2019) - Selanjutnya akan menggunakan data SPHPN jika sudah diolah	%	50	PM	PM	PM	70

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER										
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.										
PROGRAM 1: KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Matriks KL/IL.M.L.047-1)										
Kegiatan 1: Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	1.1 Jumlah kebijakan terkait data gender dan anak*	Dokumen	1	-	1	-	-	500	APBN	Kementerian PP dan PA
Kegiatan 2: Pengarusutamaan gender bidang hukum	2.1 Jumlah kebijakan bidang hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender*	Kebijakan	1	1	1	1	1	1.800	APBN	Kementerian PP dan PA

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
PROGRAM 2: Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	1.1 Kenaikan Jumlah kebijakan kondusif yang didokumentasikan	Kebijakan	-	2	2	2	2	5.000	APBN	Komnas Perempuan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER											
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan											
PROGRAM 1: Peningkatan Kapasitas Bagi Perempuan, Laki-laki (masyarakat), pendamping, dan Pemerintah (Desa, Kabupaten, Provinsi )											
Kegiatan 1: Workshop tentang pembangunan desa serta peran tokoh/kader desa, tokoh perempuan ( pertemuan pre-musrenbang perempuan)	1.1 Jumlah Pengambil kebijakan di level desa yang memasukkan perspektif gender dalam pembangunan dan kebijakan	Kegiatan	-	-	2	2	2	70	Kementerian Luar Negeri Belanda (I= Tersedia)	Nasional	CARE International Indonesia dan mitra
	1.2 Jumlah kebijakan di desa yang responsif gender termasuk perencanaan dan penganggaran RG										
PROGRAM 2: Advokasi Kebijakan Yang RG											



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2016	2017	2018	2019				
<p>Kegiatan 1: Advokasi Kebijakan untuk mendorong program, kegiatan, pemerintah mulai level desa hingga provinsi dan mempertimbangkan dan menjamin akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat bagi perempuan, anak perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, dan kelompok rentan lainnya</p> <p>1. Jumlah kebijakan yang diadvokasi 2. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam setiap level pembangunan 3. Jumlah perempuan yang dapat mengakses anggaran 4. Jumlah perempuan yang terdampak dari kebijakan, program, dan kegiatan</p>	Kegiatan	-	1	2	4	2	50	Kementerian Luar Negeri Belanda (I= Tersedia)	National	CARE International Indonesia

## TUJUAN 6. Air bersih dan sanitasi layak

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor, BPS	%	70,97	71,14a	72,04a	92	100
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	m3/detik	58,41/6,97	64,56/6,15a	84,3/11,3a	97,08/12,78	118,6/21,52
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Susenas Kor, BPS	%	PM	PM	PM	PM	PM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
INDIKATOR: 6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
PROGRAM 1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										
Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.1. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Kawasan Regional	SR	1 (kawasan)*	300 (ltr/detik)*	750 (ltr/detik)*	280,000	240,000	124,885.40	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kawasan	SR	237 (IKK)*	3,184 (ltr/detik)*	3,078 (ltr/detik)*	3,200,000	2,728,000		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Pemekaran/Perluasan	SR				1,160,000	1,148,800		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4. Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Perdesaan berbasis masyarakat	SR	1,449 (Desa)*	-	3,660 (desa)*	2,560,000	2,978,560		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK										
INDIKATOR : 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
PROGRAM 1: Ibu dan Balita Sehat										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK											
Kegiatan 1: pembekalan pengetahuan mengenai perilaku minum air yang bebas kuman kepada ibu	1.1 Jumlah ibu mengalami peningkatan pengetahuan mengenai air minum bebas kuman	Orang	-	-	150,000	150,000	150,000	-	Yayasan Unilever Indonesia	Kota Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Medan, Kota Tangerang, Kota Gorontalo, Kota Bengkulu, Kota Pekanbaru, Kota Ternate, Kota Manado	Yayasan Unilever Indonesia, PDGI, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dan Daerah, kader PKK dan posyandu
	1.2 Jumlah ibu mengalami peningkatan sikap untuk mengkonsumsi air minum bebas kuman	Orang									
	1.3 Jumlah ibu mengalami peningkatan perilaku konsumsi air minum bebas kuman	Orang									
PROGRAM 2: Sekolah Sehat											
Kegiatan 1: Pembekalan pengetahuan mengenai perilaku minum air yang bebas kuman kepada anak di sekolah dasar	1.1 Jumlah anak mengalami peningkatan pengetahuan mengenai air minum bebas kuman	Orang	-	≈1,500 ,000	1,586,898	1,500,000	1,500,000	-	Yayasan Unilever Indonesia	Sumatra Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa tengah, NTT, Kalimantan Timur, NTB, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,	Yayasan Unilever Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Persada, Spektra, Yayasan Emmanuel, Yayasan Peduli Negeri, Bina Masyarakat Peduli, ICSD, Heartindo
	1.2 Jumlah anak mengalami peningkatan sikap untuk mengkonsumsi air bebas kuman	Orang									
	1.3 Jumlah anak mengalami peningkatan perilaku konsumsi air minum bebas kuman	Orang									

## **TUJUAN 7. Energi bersih dan terjangkau**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	1. RKP 2017 2. Kementerian ESDM : Statistik Ketenagalistrikan, 2016	% (Persen)	88,3	91,16a	95,35	95,15	96,61
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	1. RKP 2017 2. Kementerian ESDM : Statistik Ketenagalistrikan, 2016	kWh	918	956a	1.012	1.129	1.200
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*	RKP 2017	SR (Sambungan Rumah Tangga)	20.363	88.915a	41.934	306.000* 80.000**	374.000* 80.000**
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	-	-	PM	PM	PM	PM	PM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1. Rasio Elektrifikasi										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1. (a) Konsumsi Listrik per Kapita										
PROGRAM 1:PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN										
Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1.1 Pangsa Energi Primer BBM Untuk Pembangkit Tenaga Listrik	%	8,58	6,96	5,81	2,08	2,04	19.830	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
	1.2 Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,87	8,65	9,6*)	8,24	8,18			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	1.3 Subsidi Listrik	Triliun	58,60	59,23	52,28	80,6	89,41		APBN	

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU											
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio Elektrifikasi											
INDIKATOR SDGs: 7.1.1.(a) Konsumsi Listrik per Kapita											
PROGRAM 1: INDONESIA TERANG											
Kegiatan 1: Edukasi penggunaan listrik tenaga surya kepada masyarakat terpencil	1.1 Jumlah rumah tangga yang diberi pelatihan	Rumah Tangga	-	283	267	539	1.054	311	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia (Piloting di TTS-NTT)	Lazismu, TNP2K, Beseipae, Kopernik, Bappeda TTS
Kegiatan 2: Memastikan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan Voluntary National Review dan Roadmap SDG 2030	2.1 Jumlah bantuan yang didistribusikan	Unit	-	283	267	539	1.054	4.148	Donasi Masyarakat (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia (Piloting di TTS-NTT)	Lazismu, TNP2K, Beseipae, Kopernik, Bappeda TTS

## **TUJUAN 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	% (Persen)	3,52	3,7a	PM	PM	PM
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS (Statistik indonesia)	Juta Rupiah	45,2	47,957a	51,89a	64,721	72,217
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS (Statistik Indonesia; Sakernas)	% (Persen)	4,70 (Tahun dasar 2010)	1,85a	2,80a	2,79	PM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
INDIKATOR SDGs: 8.1.1. Laju pertumbuhan PDB per kapita.										
INDIKATOR SDGs: 8.1.1.(a). PDB per kapita										
PROGRAM 1: PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA										
Kegiatan 1: Penumbuhan dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	1.1 Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka	Perusahaan	-	40	-	-	-	18.027,5	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.2 Sertifikasi Sumber Daya Manusia Industri Tekstil dan Aneka	orang	-	400	-	-	-	3.498,7	APBN	Kementerian Perindustrian

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
	Standar Nasional Indonesia Produk Industri Tekstil dan Aneka	SNI	-	5	15	12	30	9.429,9	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.3 Pengembangan Merk (Branding) Industri Tekstil dan Aneka	Perusahaan	-	20	-	20	30	58.230,7	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.4 Pendirian Bufferstock Kapas dan Material Center	Bufferstock	-	2	2	-	-	9.385,9	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.5 SDM Industri yang mengikuti Diklat	orang	-	-	550	200	1000	15.000,6	APBN	Kementerian Perindustrian
	1.6 Jumlah SNI Industri Tekstil, Kulit, alas kaki dan aneka	SNI Wajib	-	-	-	2	2	1.361,6	APBN	Kementerian Perindustrian

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI											
INDIKATOR SDGs: 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita											
INDIKATOR SDGs: 8.1.1.(a) PDB per kapita											
INDIKATOR SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun											
PROGRAM 1: PENELITIAN YANG DILAKUKAN PRAKARSA											
Kegiatan 1: Penyusunan Paduan Teknis Goal 8 SDGs : Panduan untuk Pemkab dan Kota	1.1 Dokumen publikasi yang dihasilkan	Dokume n	-	-	1 (Dokume n) Publikasi Buku	-	-	-	Uni Eropa (III - Belum tersedia sumber)	Nasional	Prakarsa, INFID, OXFAM, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Dibantu oleh Uni Eropa
Kegiatan 2: Identifikasi gap kebijakan (program, anggaran, kelembagaan) di 5 daerah	2.1 Teridentifikasi kondisi ketenagakerjaan di daerah	Dokume n	-	-	1 (Dokume n) Survei need assesmen t anak muda dan perempuan terhadap pelatihan kerja	1 (Dokume n) Mapping Gap kebijaka n ketenaga kerjaan	-	-	(III - Belum tersedia sumber)	Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Kulonprogo, Yogyakarta	Prakarsa dan INFID bekerjasama dengan CSOs lokal



## TUJUAN 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Renstra Kementerian PUPR 2015-2019	%	92-93	90,3a	94	97	98
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	RKP 2018	km	820 (2014, kumulatif)	104a	253	379	1.000 (kumulatif)
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	RKP 2018	km	954,43 (2014, kumulatif)	542,27a	902,3	1.353,17	3.258 (kumulatif)
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	RKP 2017	unit	237 (2014)	15 (kumulatif)			252 (kumulatif)
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	RKP 2018	unit	210 (2014)	23a	15	16	270 (kumulatif)
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	RPJMN 2015-2019	lokasi	PM	24 (kumulatif)			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR									
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional									
PROGRAM 1: PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL (MATRIKS BIDANG PEMBANGUNAN HAL II.9.M-16)									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1.1 Panjang jalan yang terpelihara	Km	34.886	45.593	45.593	45.593	45.593	111.542	APBN	Kementerian PUPR
	1.2 Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	1.545	202	408	454	456	35.517.900		
	1.3 Panjang jalan yang dibangun	Km	329	490	503	677	652	42.837.300		

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR											
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol											
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api											
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara											
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan											
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis											
PROGRAM 1: KAJI ULANG RANCANGAN (DESIGN REVIEW) VERIFIKASI, INSPEKSI, PENGUJIAN, PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN AUDIT KELAIKAN INFRASTRUKTUR											
Kegiatan 1: Melakukan survey, inspeksi, dan verifikasi rancangan pembangunan jalan tol, dermaga penyeberangan, pelabuhan, dan bandara melalui pengujian struktur dan ketahanan bangunan	1.1 Jumlah laporan inspeksi	Laporan	-	4.080	4.134	4.500	5.000	174.000	PT. Sucofindo (Persero) (I = Tersedia)	Nasional	PT. Sucofindo (Persero)

## TUJUAN 10. Berkurangnya kesenjangan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	index	0,402 (September)	0,394a	0,391a	0,38	0,36
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	11,13 (September)	10,7a	10,12a	9,5 - 10	7,0-8,0
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	BAPPENAS dan BPS	kabupaten	70 (2014)	PM	PM	PM	80
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	BAPPENAS dan BPS	desa	20.432 (2014)	1.500 Desa terentaskan	3.000 Desa terentaskan	4.500 Desa terentaskan	5.000 Desa terentaskan
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	BAPPENAS dan BPS	desa	50.763 (2014)	600 Penambahan Desa Mandiri	1.200 Penambahan Desa Mandiri	1.800 Penambahan Desa Mandiri	2.000 Penambahan Desa Mandiri
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BAPPENAS dan BPS	%	5,39 (2014)	6 - 6,2	6,4 - 6,6	6,7 - 6,9	6,9 - 7,1
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BAPPENAS dan BPS	%	18 (2014)	17,5 - 18	16 - 16,5	15,5 - 16	15 - 15,5

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN									
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur									
PROGRAM 1: KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Jaminan Sosial	Dokumen	3	5	3	3	3	10,660	APBN	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kegiatan 2: Koordinasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Kemiskinan	Dokumen	3	3	3	3	3	9,744		
Kegiatan 3: Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	3	6	3	3	3	12,796		

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaa n	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN											
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur											
PROGRAM 4: 1.000 BEASISWA											
Kegiatan 1: Kemitraan CSR	1.1 Penguatan kemampuan rumah tangga miskin di sekitar kampus dalam menggunakan sumber-sumber daya ekonomi/usaha	Persentas e	-	-	-	50	80	1.000	LKSFI - UHAMKA (I - Tersedia)	DKI	LKSFI - UHAMKA
	1.2 Menjamin nutrisi rumah tangga miskin di sekitar kampus	Persentas e	-	-	-	20	50	600	LKSFI - UHAMKA (I - Tersedia)	DKI	LKSFI - UHAMKA
PROGRAM 5: PANTI DAN SANTUNAN KELUARGA AISIYIAH											
Kegiatan 1: Pemberian santunan kepada 269 Panti dan lebih dari 1000 keluarga	1.1 Jumlah anak yang diberikan santunan pada panti dan keluarga	Anak	-	50000	50000	50000	50000	-	SWADAY A, DINSOS (III - Belum	30 PROVINSI	AISIYIAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN										
								tersedia sumber)		

### **TUJUAN 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh								
11.1.1.(a).	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	PM	PM	PM	PM	100
11.1.1.(b).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kawasan Perkotaan Metropolitan	PM	3	3	3	2
11.1.1.(c).	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota Sedang & Kota Baru	PM	8 & 5	8 & 5	8 & 5	8 & 5

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
TUJUAN 11. KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN									
INDIKATOR: 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.									
PROGRAM 1: PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
Kegiatan 1: Pengembangan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	1.1. Jumlah rumah tangga (RT) berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR-FLPP Rumah Tapak dan Sarusun (termasuk sewa beli)	RT	130,000	175,000	225,000	250,000	120,000	1,049.4	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah rumah tapak yang mendapat fasilitas Kredit Konstruksi	RT	0	1,000	1,500	2,000	1,500		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR-FLPP Rumah Swadaya	RT	0	50,000	150,000	200,000	50,000		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4. Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas bantuan uang muka	RT	55,000	106,500	124,250	124,370	65,880		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN											
INDIKATOR : 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.											
PROGRAM 1: Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah											
Kegiatan 1: Pembangunan Rumah Baru	1.1. Jumlah KK yang menerima pembangunan rumah baru	KK	2015	646	548	660	748	267,258	-	Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Sumatera Utara, Batam, Jawa Barat, Banten	Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia (YHKI)
Kegiatan 2: Merenovasi rumah tidak layak huni	2.1. Jumlah KK yang mendapat renovasi rumah tidak layak huni	KK	2015	919	549	2,660	4,026		-		
Kegiatan 3: Merehabilitasi rumah tidak layak huni	3.1 Jumlah KK yang mendapat renovasi rumah tidak layak huni	KK	2015	103	43	690	782		-		

## TUJUAN 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.								
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins</i> program.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kolaborasi tematik	4	5	6	7	8
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peserta Proper	1.406	1.422	1.500	1.500	1.500
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Juta ton	100	120	130	140	150

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019			
TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB									
INDIKATOR : 12.1.1*. Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
PROGRAM 1: Program Nasional10 tahun SCP 2013-2023										
Kegiatan 1: Pertemuan dalam rangka Updating kolaborasi SCP	1.1. Jumlah Kolaborasi Pertemuan dalam rangka Updating kolaborasi SCP	Kolaborasi tematik	4	5	6	7	8	-	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR: 12.4.1.(a). Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.										
PROGRAM 2: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan										
Kegiatan 1: Pengendalian Pencemaran Udara	1.1. Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri	industri	-	-	188	188	1500	15,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 2: Pemulihan lahan akses terbuka	2.1. Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	industri	-	-	18	18	80	5,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 3: Pengendalian Pencemaran Air	3.1. Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah melalui Program PROPER sebesar 75% dari 2000 industri yang dipantau	industri	-	-	600	1800	1800	26,000	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
INDIKATOR: 12.4.1.(a). Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.										
PROGRAM 1: Mengikuti penghargaan PROPER yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan										



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2016	2017	2018	2019					
Kegiatan 1: Mengikuti penghargaan PROPER	1.1. Peringkat Pabrik Nestlé Kejayan di Jawa Timur mengikuti penghargaan PROPER	Peringkat	2012	Hijau	Belum ada hasil pengumuman untuk penghargaan ini				-	PT Nestlé Indonesia	Jalan Raya Pasuruan-Malang Km 9.5, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur	PT Nestlé Indonesia - Pabrik Kejayan
	1.1. Indikator kegiatan: Pabrik Nestlé Panjang di Lampung mengikuti penghargaan PROPER	Peringkat	2012	Biru					-		Jalan Raya Bakauheni Km.13, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung	PT Nestlé Indonesia - Pabrik Panjang
	1.1. Indikator kegiatan: Pabrik Nestlé Cikupa di Banten mengikuti penghargaan PROPER	Peringkat	2012	Biru					-		Jalan Raya Serang Km.12, Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Banten	PT Nestlé Indonesia - Pabrik Cikupa
INDIKATOR: 12.4.2.(a). Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).												
Program 1: Penilaian kualitas tanah dan air												
Kegiatan 1: Sampling kualitas tanah dan air untuk mengetahui kadar pencemaran limbah B3 dan logam berat	1.1. Jumlah sertifikat analisis mengenai kadar pencemaran limbah B3 dan logam berat	Sertifikat	2016	3,702	3,886	4,000	4,200	240,000	PT. SUCOFIN DO (Biaya Operasional )	Seluruh Indonesia	PT SUCOFIN DO (Persero)	

### TUJUAN 13. Penanganan perubahan iklim

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Dokumen	69	40	40	40	69
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	DIBI BNPB	Orang	PM	PM	PM	PM	PM
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.								
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.	RPJMN 2015-2019	Dokumen BUR ke-	1	2a	-	3	-
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	RPJMN 2015-2019	Dokumen	1	1a	1	1	1

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM										
INDIKATOR: 13.1.1* Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah										
PROGRAM 1: Penanggulangan Bencana										
Kegiatan 1: Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	1.1. Jumlah kajian risiko bencana	dokumen	10	12	34	44	44	67,118	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
	1.2. Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana	dokumen	10	-	45	26	26	37,100		
	1.3. Standarisasi pengurangan risiko bencana	dokumen	5	5	3	2	2	6,625		

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM										
	1.4. Jumlah dokumen pengelolaan risiko bencana yang disusun	dokumen	-	-	-	15	15	11,800		
PROGRAM 2: Pengembangan Perpustakaan										
Kegiatan 1: Penyediaan akses literasi informasi dengan konten lingkungan dan perubahan iklim	1.1 Jumlah mitra jejaring perpustakaan yang difasilitasi TIK	perpustakaan	50	25	20	50	50	-	APBN	Perpustakaan Nasional RI
	1.2 Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan langganan e-jurnal	eksemplar	143,000	144,000	470,800	677,813	677,813	-		

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM											
INDIKATOR: 13.1.1* Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah											
PROGRAM 1: Program Masjid Ramah Lingkungan											
Kegiatan 1: Sosialisasi Menggerakkan masjid untuk melakukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1.1 Jumlah masjid yang melakukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Masjid	-	500	1,000	2,000	-	150	-	Indonesia	MUI
PROGRAM 2: Livelihood - FMNR											
Kegiatan 1: Pengembangan Rencana Kesenambungan Pertanian / Bisnis	1.1 Jumlah produsen terlatih yang memiliki pengetahuan tentang Strategi PRB (Pengurangan Resiko Bencana) dan API (Adaptasi Perubahan Iklim)	Orang	-	-	-	-	-	250	Multi funding dari dalam dan luar negeri	Sulawesi Tengah (Sigi, Donggala, Palu, Tojo Una-Una, Parigi Moutong Maluku Utara	Wahana Visi Indonesia

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019				
	1.2 Jumlah Rencana Kesenambungan Pertanian / Usaha dikembangkan dan difungsikan	Rencana	-	-	-	-	-			(Ternate, Halmahera Utara) NTT (TTS, Kupang, Sumba Timur)	Wahana Visi Indonesia
Kegiatan 2: Dukungan masukan, alat dan informasi iklim bagi petani / pemilik usaha	2.1 Jumlah produsen yang telah memanfaatkan iklim musim dan ramalan cuaca	Produsen	-	-	-	-	-	250			Wahana Visi Indonesia

## TUJUAN 14. Ekosistem lautan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.								
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Dokumen (PP)	-	1a	-	-	-
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	WPP	5	7a	9	10	11
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.								
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	% (Target dibagi dengan MSY)	80	≤80	≤80	≤80	≤80
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.								
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Jt Ha	16,5	17,1a	17,9	18,8	20,0

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 14. EKOSITSEM LAUTAN										
INDIKATOR : 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional										
PROGRAM 1: Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil										
Kegiatan 1: Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.1. Jumlah lokasi laut, selat, teluk antar wilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi	Lokasi	34	1	2	6	9	6,295.0	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	1.2. Jumlah provinsi yang memiliki RZWP3K yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	Prov.	26	6	8	23	-	7,824.9		
	1.3. Jumlah KSN dan KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	Kawasan	4	2	5	47	37	11,655.4		
	1.4. Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi	Kawasan Pesisir	-	-	10	20	30	7,013.0		
	1.5. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil utara Jawa yang direhabilitasi mangrovenya	Batang/lokasi	3,000,000 (Batang)	3,000,000 (Batang)	900,000 (Batang)	6 (Lokasi)	6 (Lokasi)	11,655.5		
	1.6. Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Kawasan	48	17	17	11	10	235,852.6		

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN											
INDIKATOR : 14.1.1 Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung (Indikator global yang akan dikembangkan)											
PROGRAM 1: Bank Sampah											
Kegiatan 1: Edukasi dan pendampingan pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan menerapkan prinsip 3R	1.1 Jumlah bank sampah yang terbentuk	Unit	-	1,633	2,615	2,800	3,400	-	Internal Perusahaan	Medan, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Magelang, lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado.	Yayasan Unilever Indonesia, Yayasan Artajaya, Yayasan Rumah Pelangi, LPTT, Persada, Yayasan Lohjinawi, Wehasta, Spektra, Bali Wastu Lestari, Ecco Walibar, Yayasan Peduli Negeri.
	1.2 Jumlah nasabah bank sampah	Orang		73,228	344,274	-	-	-			
	1.3 Jumlah reduksi sampah	Ton		4,363	6,125	-	-	-			
	1.4 Manfaat ekonomi yang diperoleh	Rupiah		6,45	8,38	-	-	-			
PROGRAM 2: Bersih Sampah Laut											
Kegiatan 1: Sosialisasi & Edukasi	1.1 Jumlah peserta yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	orang		60	60	60	60	1,500	Swadaya	Jawa Barat, DKI Jakarta & Jawa Timur	LPBI NU Pusat
	1.2 Jumlah kabupaten yang terlibat sosialisasi di masing-masing kabupaten	kabupaten		3	3	3	3				
Kegiatan 2: Aksi Bersih Sampah Laut	2.1 Jumlah peserta yang terlibat aksi di masing-masing kabupaten	orang		100	100	100	100				
	2.2 Jumlah kabupaten yang terlibat aksi di masing-masing kabupaten	kabupaten		3	3	3	3				

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN										
Kegiatan 3: Pelatihan Pemanfaatan sampah laut melalui metode ecobricks ocean	3.1 Jumlah peserta yang terlibat pelatihan di masing-masing kabupaten	orang		100	100	100	100			
	3.2 Jumlah kabupaten yang terlibat pelatihan di masing-masing kabupaten	kabupaten		3	3	3	3			
Kegiatan 4: Pendampingan kepada masyarakat	4.1 Jumlah kabupaten yang mendapat pendampingan masyarakat	kabupaten		3	3	3	3			

## TUJUAN 15. Ekosistem daratan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1.(a).	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	50,6	50,7	50,6	50,6	50,6
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1.(a).	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Hektar	10,000	40,000	60,000	80,000	100,000
15.2.1.(b).	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Ha	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000
15.2.1.(c).	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KPA	20	100	150	200	260
15.2.1.(d).			KPHK	20	30	50	80	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KPHL	40	80	120	160	182
			KPHP	40	147	212	269	347

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN										
INDIKATOR : 15.1.1.(a) Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan										
PROGRAM 1: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan										
Kegiatan 1: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1.1. Indeks tutupan lahan minimal 62%	%	50.6	50.7	50.6	50.6	50.6	640,300	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
INDIKATOR : 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya										
PROGRAM 1: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem										
Kegiatan 1: Pengelolaan Kawasan Konservasi	1.1 Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	Hektar	5,454.00	9,225.87	60,000	80,000	100,000	165,470	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016	2017	2018	2019			
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN										
Kegiatan 2: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	2.1 Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	Hektar	5,454.00	9,225.87	20,000	30,000	40,000	2,543,030	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kegiatan 3: Pengelolaan Taman Nasional	3.1 Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	Hektar	5,454.00	9,225.87	40,000	50,000	60,000	2,387,880	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 15. EKOSISTAM DARATAN										
INDIKATOR : 15.1.1.(a) Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan										
PROGRAM 1: Building with Nature										
Kegiatan 1: Pemberdayaan masyarakat untuk restorasi kawasan pesisir dan mendukung perlindungan green belt melalui	1.1 Jumlah lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Lokasi kegiatan (desa)	2016	-	9	9	9			Wetlands International Indonesia

mekanisme BioRights (penghijauan dengan skema pemberian hibah bersyarat)											
Kegiatan 2: restorasi ekologis mangrove (konversi kawasan tambak menjadi kawasan hijau/mangrove) meliputi kegiatan assesment, perbaikan hidrologi, livelihood	2.1 Luas restorasi ekologis mangrove (konversi kawasan tambak menjadi kawasan hijau/mangrove) meliputi kegiatan assesment, perbaikan hidrologi, livelihood	Hektar	2016	-	-	-	100				Wetlands International Indonesia
Kegiatan 3: Advokasi/penguatan kebijakan kebijakan untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan atau gambut dalam kerangka Pengurangan Risiko Bencana	3.1 Jumlah desa yang memiliki peraturan desa untuk perlindungan, pengelolaan dan pemulihan ekosistem mangrove dan atau gambut	Desa	2016	-	-	-	13				Wetlands International Indonesia

## TUJUAN 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.								
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Robinops SOPS PPA	Persentase	43,58 (BPS)	PM	PM	PM	PM
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	BPHN (Kementerian hukum dan HAM)	Orang	litigasi 3.450; nonlitigasi 259	litigasi 8.005a; nonlitigasi 1.188a	litigasi 6.365; nonlitigasi 7.245	litigasi 6.375; nonlitigasi 7.250	litigasi 3.021; nonlitigasi 3.645
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Badilag, Badilum dan Badimiltun MA	Perkara	sidang di luar gedung pengadilan dan Pos layanan hukum 119.175; pembebasan biaya perkara 114.122	sidang di luar gedung pengadilan 111.611a; pembebasan biaya perkara 139.599a; pos layanan hukum 197.137a	sidang di luar gedung pengadilan 113.702a; pembebasan biaya perkara 114.080a; Pos layanan hukum 158.610a	sidang di luar gedung pengadilan dan pembebasan biaya perkara 945; Pos layanan hukum 24.171	sidang di luar gedung pengadilan 55.665; pembebasan biaya perkara 3.200; Pos layanan hukum 96.500

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Ditjen Pemasyarakatan (Kemenkumham)	Persentase	2,6	2,9a	3,1a	Menurun	Menurun

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh										
INDIKATOR SDGs: 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										
PROGRAM 1: Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana										
Kegiatan 1: Penindakan Tindak Pidana Umum	1.1 Jumlah Penanganan Tindak Pidana Umum	Jumlah Penanganan Tindak Pidanan Umum	185.203	184.163	140.866	224.371	224,371	4.750.000	APBN	POLRI
	1.2 Kasus Pembunuhan (338 KUHP)	Kasus	1.321 (86%)	1.197 (97%)	766 (99%)	766 (99%)	766 (99%)	270,805	APBN	POLRI
INDIKATOR SDGs: 16.1.2. (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
PROGRAM 1: Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat										
Kegiatan 1: Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	1.1 Pengamanan Aksi Unjuk Rasa	Jumlah Personel	575 giat (x 1000 org)	950 giat	1.218 giat	120.000	120.000	120.000	APBN	POLRI
	1.2 Pengamanan Konflik Sosial	Kegiatan	8	21	18	18	18	370.210	APBN	POLRI
	1.3 Pengamanan Unras Anarkis	Kegiatan	3 kali	4 kali	2 kali	2	2	199.390	APBN	POLRI

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh										
INDIKATOR SDGs: 16.1.2. (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
PROGRAM 3:										

Kegiatan 1: Pelatihan Literasi Digital	1.1 Output: Para santri memiliki pemahaman bagaimana cara kerja media digital dan bagaimana memanfaatkan untuk dakwah cinta tanah air	Kegiatan	1	2	2	7	7	720	PP RMI NU bekerjasama dengan Pemerintah dan pihak terkait (belum tersedia sumber)	19 Propinsi	PP RMI NU Bersama Pemerintah dan Pihak Lain Terkait
Kegiatan 2: Pelatihan Islam dan Gerakan Cinta Tanah Air	2.1 Output: Makin kuat cinta tanah air di kalangan pesantren.	Kegiatan	0	0	1	5	7	455	PP RMI NU bekerjasama dengan Pemerintah dan pihak terkait (belum tersedia sumber)	13 Propinsi	PP RMI NU Bersama Pemerintah dan Pihak Lain Terkait

## **TUJUAN 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS: Statistik Keuangan	Persentase	13,08	12,54a	12,75	12,76	PM
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri	Persentase	10,75	10,36a	10,82	10,9	>12

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target Pencapaian			
					2016	2017	2018	2019
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Kementerian Keuangan	Persentase	66,73	67,02a	70,41	71,12	PM
<b>Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.</b>								
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI dan BI	Persentase	1,09	0,93a	0,85	0,82	0,79
<b>Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.</b>								
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Bank Indonesia	Persentase	30,57	35,35a	PM	PM	PM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 17										
INDIKATOR 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap GDP menurut sumbernya;										
INDIKATOR 17.1.1. (a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB;										
INDIKATOR 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.										
PROGRAM 1: PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK										
Kegiatan 1: Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan	1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Rutin	Persen	-	100	100	100	100	38.931,34	APBN	Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, DJP, Kementerian Keuangan
Kegiatan 2: Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah	2.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Rutin	Persen	-	100	100	100	100	2.605.945,28	APBN	Kanwil DJP, Kementerian Keuangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 17										
Kegiatan 3: Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah	3.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Rutin	Persen	-	100	100	100	100	15.126.310,89	APBN	KPP DJP, Kementerian Keuangan
PROGRAM 2: PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI										
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai	Persen	-	100	100	100	100	1.319.703,71	APBN	Kanwil DJBC, Kementerian Keuangan
Kegiatan 2: Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	2.1 Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai	Persen	-	100	100	100	100	4.018.066,10	APBN	KPPBC, DJBC, Kementerian Keuangan
Kegiatan 3: Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Utama	3.1 Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai	Persen	-	100	100	100	100	781.213,43	APBN	Kantor Pelayanan Utama, DJBC, Kementerian Keuangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan	Baseline	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019				
TUJUAN 17										
INDIKATOR 17.6.1. (a) Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular:										

INDIKATOR 17.9.1. (a) Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.											
PROGRAM 1: MENINGKATNYA KONTRIBUSI UNIVERSITAS DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR											
Kegiatan 1: Meningkatnya kegiatan pendidikan gelar dan non gelar bagi mahasiswa dari negara-negara berkembang (negara Selatan)	1.1 Jumlah Universitas yang menyelenggarakan pendidikan gelar (S2 dan S1) bagi mahasiswa beasiswa KNB	Institusi	-	-	16	N/A	N/A	PM	APBN (I - Tersedia)	Seluruh Indonesia	Universitas -universitas Negeri dan Swasta yang melaksanakan KSST
	1.2 Jumlah Mahasiswa dari Negara Berkembang Penerima Beasiswa di Unibraw	Orang	-	-	7	10	14	1.674	DIPA Universitas (I - Tersedia)	Malang	Universitas Brawijaya
	1.3 Jumlah lulusan dari negara Selatan yang menempuh studi di Unibraw	Orang	-	-	N/A	2	5		DIPA Universitas (I - Tersedia)	Malang	Universitas Brawijaya
	1.4 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa KNB	Orang	-	-	1	5	10	474	DIPA Universitas (I - Tersedia)	Surabaya	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

### Lampiran 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs

#### Tujuan 1. Tanpa kemiskinan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.	Indikator global yang akan dikembangkan.
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan
	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber	Indikator nasional sebagai proksi indikator

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		air minum layak dan berkelanjutan.	global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.	1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## Tujuan 2. Tanpa kelaparan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian,	2.a.1	Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.		bantuan lain untuk sektor pertanian.	
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat <i>the Doha Development Round</i> .	2.b.1	Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	2.b.2	Subsidi ekspor pertanian.	Indikator global yang akan dikembangkan.
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1	Indikator anomali harga pangan.	Indikator global yang akan dikembangkan.



### Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	dalam lampiran perpres).
	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur $\leq 18$ tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq 18$ tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.4.2*	Angka kematian ( <i>insidens rate</i> ) akibat bunuh diri.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran Perpres).
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	dalam lampiran perpres).
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			dalam lampiran perpres).
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur $\geq 15$ tahun dalam satu tahun terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Indikator global yang akan dikembangkan.
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	Indikator nasional sebagai tambahan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran Perpres).
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.b.2	Total <i>Official Development Assistant</i> (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

#### **Tujuan 4. Pendidikan berkualitas**

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-	4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Indikator global yang akan dikembangkan.
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

## Tujuan 5. Kesetaraan gender

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Indikator global yang akan dikembangkan.
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk	Indikator global yang akan dikembangkan.



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## **Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak**

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah	Indikator nasional sebagai proksi indikator

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem	Indikator nasional sebagai proksi indikator

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.4.2	Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan ( <i>withdrawal</i> ) air tawar terhadap ketersediannya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata	Indikator nasional sebagai proksi indikator

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Negara.	global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## **Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau**

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
terbarukan dalam bauran energi global.			
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.	7.a.1	Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar.	Indikator global yang akan dikembangkan.
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.	7.b.1	Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.



## **Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi**

<b>TARGET</b>	<b>INDIKATOR</b>		<b>KETERANGAN</b>
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan	Indikator nasional sebagai proksi indikator

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		Menengah) ke layanan keuangan.	global (ada di dalam lampiran perpres).
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	8.4.1	Jejak material ( <i>material footprint</i> ) yang dihitung selama tahun berjalan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	8.4.2	Konsumsi material domestik ( <i>domestic material consumption</i> ).	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.			global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		pelayanan jasa keuangan bergerak.	
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.	8.a.1	Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan <i>the Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .	8.b.1	Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Indikator nasional sebagai proksi indikator

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran pepres).
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di lampiran pepres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	Indikator global yang akan dikembangkan.
9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.		resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.	
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Indikator global yang akan dikembangkan.
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).



## Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di lampiran perpres).
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.		menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	10.5.1	<i>Financial Soundness Indicator.</i>	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.	10.6.1	Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.	10.7.1	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.7.2	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan <i>World Trade Organization</i>	10.a.1	Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	10.b.1	Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja	10.c.1	Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali ( <i>buffer</i> ) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	
	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) .	Indikator global yang akan dikembangkan.
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> .			
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.

## Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.1 Melaksanakan <i>the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i> , dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins program</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.	12.2.1	Jejak material ( <i>material footprint</i> ).	Indikator global yang akan dikembangkan.
	12.2.2	Konsumsi material domestik ( <i>domestic material consumption</i> ).	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.	Indikator global yang akan dikembangkan.
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	Indikator global yang akan dikembangkan.
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan	12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.			

### Tujuan 13. Perubahan iklim

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1*	Dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) Indonesia.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
peringatan dini perubahan iklim.	13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.	13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.	

## Tujuan 14. Ekosistem lautan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.	Indikator global yang akan dikembangkan.
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Indikator global yang akan dikembangkan.



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan	14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur ( <i>IUU Fishing</i> ).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
husus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i> .			di dalam lampiran perpres).
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.	14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the <i>Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines</i> tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.	14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil ( <i>small-scale artisanal fishers</i> ) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari " <i>The future we want</i> ".	14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS ( <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> ).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

## Tujuan 15. Ekosistem daratan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			(tidak ada di dalam lampiran perpres).
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

## **Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh**

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			(tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).	Indikator global yang akan dikembangkan.
	16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
penyuapan dalam segala bentuknya.		suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Indikator global yang akan dikembangkan.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1	Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	di dalam lampiran perpres).
	16.7.2	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi dari indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		menurut hukum HAM Internasional.	
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

### Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan ( <i>Official Development Assistance - ODA</i> ), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.			
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	17.3.1	Investasi Asing Langsung ( <i>Foreign Direct Investment</i> /FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga ( <i>Debt Service</i> ) terhadap ekspor barang dan jasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
untuk mengurangi tekanan utang.			
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.6.2	Langganan <i>broadband</i> internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar ( <i>fixed broadband</i> ) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			dalam lampiran perpres).
17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.	17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular.	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			ada di dalam lampiran perpres).
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement</i> (FTA).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan <i>World Trade Organization</i> termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian ( <i>rules of origin</i> ) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.	17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	17.13.1*	Tersedianya <i>Dashboard</i> Makroekonomi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	dalam lampiran perpres).
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.18.3.(a)	Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian ( <i>Vital Statistics Register</i> )	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> .	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses	Indikator nasional sebagai tambahan



TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		data Badan Pusat Statistik (BPS).	indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).